



P U T U S A N

Nomor: 07 /Pid.Sus.TPK /2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

A.	IDENTITAS TERDAKWA		
	Nama Lengkap	:	HARIANTO
	Tempat lahir	:	Pulukan.
	Umur/ tanggal lahir	:	41 Tahun / 12 Agustus 1974.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal	:	Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana.
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Swasta (Karyawan Rumah Makan Pulukan) / Pimpinan Kecamatan Partai Golkar.
	Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum : Tahanan kota Sejak tanggal 15 Pebruari 2016 s/d tanggal 05 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : Tahanan kota Sejak tanggal 26 Pebruari 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016.
- Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : Tahanan kota sejak tanggal 27 Mare 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016.
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : Tahanan kota sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016.

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I MADE SUARDIKA ADNYANA SH, dkk, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum TAKSU LOW OFFICE , yang berkantor di Jalan Durian N0.7 C Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2016..

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Pebruari 2016 Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 Maret 2016 Nomor 07/ Pid.Sus- TPK /2016/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Pebruari 2016 Nomor 07/Pid.Sus-TPK /2016/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-01/P.1.16/Ft.1 / 02 / 2016 tanggal 25 pebruari 2016;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2016 NOMOR REG. PERK. : PDS - 01 /NEGARA/ 02 /2016 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa HARIANTO oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu "turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara yang" melanggar Pasal 3 yo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HARIANTO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa HARIANTO membayar uang pengganti sebesar Rp.30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari barang bukti berupa uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.50.000.000,-
 2. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran hibah kepada kelompok masyarakat tanggal 20 Desember 2013 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Fakta Integritas Nomor : 01/PPBKMS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah Nomor : 02/PPBKMS/XII/ 2013 tanggal 17 Desember 2013.
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan I Komang Gde Merta tanggal 17 Desember 2013 ;
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Secara Administrasi Terhadap Penggunaan Dana Belanja Hibah Kelompok Masyarakat tanggal 19 Desember 2013 ;
 7. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Gubernur Bali Nomor 2353/03-N/HK/2013 Tentang Penerima Hibah Kepada Kelompok Masyarakat tanggal 3 Desember 2013 beserta lampirannya
 8. 1 (satu) eksemplar asli Naskah Perjanjian hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Nomor : 900/6521/SEKRET-KEU
03/KTT AR/XII/2013
Tentang Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Penerima hibah Sebagaimana Dalam Keputusan Gubernur Bali Noor 2353/03-N/HK/2013 ;
 9. 2 (dua) lembar foto copy rekening Bank BPD No. Rek. : 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian bibit Kambing ;
 10. 2 (dua) lembar foto copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 13 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar foto copy Proposal Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember tanggal 20 Juni 2013 ;
12. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember tanggal 10 Februari 2014 ;
- 13.1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 900/9278/ Sekret/ Disnakeswan perihal Pengajuan Administrasi Permohonan Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat ;
14. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat Nomor : 900/10149/KEU tanggal 20 Desember 2013 ;
15. 2 (dua) lembar Lampiran III Peraturan Gubernur Bali tanggal 25 Oktober 2013 Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
16. 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank BPD No. Rek. : 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing yang distempel asli ;
17. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Tabungan Periode : 01-12-2013 s/d 13-04-2015 No. Rek. 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing ;
18. 1 (satu) buah Buku Kas 3 Kolom ;
19. 9 (sembilan) lembar foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengobatan Ternak Kambing
20. 9 (sembilan) lembar foto copy Berita Acara Kematian Ternak ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Nota Debet/Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar No. RNO/PNB/2013.D tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,-
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 22187/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang telah disahkan ;

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 02453/SPM-LS/PPKD/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- ;
24. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- untuk pembayaran Belanja Hibah Kelompok Masyarakat Kepada Panitia Pengadaan Bibit Babi Kelompok Usaha Kecil Wanita Taman Asri, Banjar Balik II Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana untuk Pengadaan Bibit Babi, beserta 27 (dua puluh tujuh) Penerima Dana Hibah Kelompok Masyarakat lainnya, Tahun 2013.
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 tanggal 24 Desember 2013
26. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013;
27. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 ;
28. 1 (satu) lembar foto Nota Dinas dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Nomor : 524/10043/Sekret/Disnakkeswan tanggal 24 Desember 2013 hal : Pembatalan Hibah kepada Kelompok Masyarakat ;
29. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2002 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali ;
30. 1 (satu) buah buku folio dengan format Buku Kas;
31. 1 (satu) bundel kelengkapan KTP dan lain-lain;
32. 4 (empat) lembar kuitansi belanja sewa ruang rapat/pertemuan dan kelengkapan dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi Bali atas nama Ir. I Ketut Suania ;
33. 1 (satu) bendel Proposal yang berisi :
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Pengadaan Kandang dan Kambing, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah Proposal Renovasi Masjid Jami “Nurul Huda” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Perlengkapan Kelompok Suka Duka Muslimin “Nurul Jadid” Banjar Pulukan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Merajan Dadya “Pasemetonan Arya Wangbang Pinatih” Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Merajan Dadya “Warga Bali Mula” Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- ⇒ 1 (satu) buah Proposal permohonan Bantuan Pembangunan Tembok Penyengkar Merajan Dadia Warga Pasek Gel-Gel Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- 34.1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Pura Kahyangan Jagat Bhujangga Sakti Luwuh;
- 35.1 (satu) buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perbekel Desa Pulukan Tahun 2014;
- 36.3 (tiga) buah Proposal Panitia Perlengkapan Kelompok Suka Duka “GIRI ANYAR” Banjar Mengenuanyar Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana ;
- 37.1 (satu) buah buku tamu Kelompok Ternak Kambing “Sinar Matahari” Banjar Pasinggahan, Desa Medewi Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 38.1 (satu) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing “Sinar Mentari” Banjar Pasinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 39.4 (empat) buah Hasil Verifikasi Kelompok;
- 40.1 (satu) buah RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kelompok Ternak Kambing “Sinar Mentari”;

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.4 (empat) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing "Maju Jaya Mandiri"
Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten
Jembrana;

42.1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing "Maju Jaya Mandiri"
Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten
Jembrana;

43.4 (empat) lembar Struktur Kelompok Ternak Kambing "Maju Jaya
Mandiri" Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan,
Kabupaten Jembrana;

44.1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kelompok Ternak
Kambing "Maju Jaya Mandiri";

45.1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok;

46.10 (sepuluh) lembar fotocopy KTP atas nama :

- I GEDE EKA ARDANA;
- I KADEK AGUS ARIANA;
- I MADE SAPUTRA;
- I KETUT ARTA;
- I MADE SUWATRA;
- I KETUT MUSTIKA;
- I MADE MIDEH;
- I WAYAN KADER;
- I NYOMAN JULIARTA;
- I NYOMAN SUTARJANA ARIASA;

47.7 (tujuh) lembar fotocopi Kartu Keluarga atas nama :

- I KETUT ARTA;
- I MADE SUWARTA;
- I KETUT MUSTIKA;
- I MADE MIDEH;
- I KADEK RITA BUDHI ATMAJA;
- I NYOMAN JULIARTA;
- I NYOMAN SUTARJANA ARIASA.

48.1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing "KARYA ABADI"
Banjar Bunut Bolon, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan,
Kabupaten Jembrana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.3 (tiga) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing “KARYA ABADI”
Banjar Bunut Bolon, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan,
Kabupaten Jembrana;
- 50.1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok ;
- 51.1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing “Cahaya Baru”
Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten
Jembrana;
- 52.4 (empat) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing “Cahaya Baru”
Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten
Jembrana;
- 53.1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok;
- 54.1 (satu) buah Surat tanggal 24 Februari 2015 : Permohonan sebagai
pemohon intervensi di dalam perselisihan internal Partai Golkar antara
kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November
sampai dengan 3 Desember 2014 (Ketua Umum Aburizal Bakrie dan
Sekretaris Jendral Idrus Marham) dengan kepengurusan hasil Munas IX
Partai Golkar di Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014
(Ketua Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin
Amali) ;
- 55.1 (satu) buah surat Nomor : B-21/Golkarda/III/2015 tanggal 12 Maret
2015 perihal instruksi;
- 56.1 (satu) buah surat nomor : B-22/Golkarda/III/2015 tanggal 13 Maret 2015
perihal Undangan Rakorda DPD Partai Golkar Provinsi Bali;
- 57.1 (satu) buah surat undangan nomor:..../Banser/PIK/1603/2015 tanggal
16 Maret 2015;
- 58.1 (satu) buah surat permohonan intervensi tanggal 26 Februari 2015;
- 59.5 (lima) bendel fotokopi KTP;
- 60.1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUHARIADI;
- 61.3 (tiga) bendel fotocopi Kartu Keluarga;
- 62.4 (empat) lembar surat kesepakatan kelompok Ternak Kambing :
- Kelompok Ternak Kambing “Sinar Mentari”;
 - Kelompok Ternak Kambing “Cahaya Baru”;
 - Kelompok Ternak Kambing “Karya Abadi”;
 - Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri.

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.4 (empat) lembar fotocopi Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 490/BPMD/2013 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Pekutatan tanggal 2 September 2013.

64.4 (empat) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi atas nama :

- Kelompok Maju Jaya Mandiri ;
- Kelompok Karya Abadi ;
- Kelompok Sinar Mentari ;
- Kelompok Cahaya Baru ;

65.4 (empat) lembar Surat Pernyataan atas nama :

- Kelompok Maju Jaya Mandiri ;
- Kelompok Karya Abadi ;
- Kelompok Sinar Mentari ;
- Kelompok Cahaya Baru ;

66.4 (empat) lembar nama pembuat pernyataan atas nama :

- Kelompok Maju Jaya Mandiri ;
- Kelompok Karya Abadi ;
- Kelompok Sinar Mentari ;
- Kelompok Cahaya Baru ;

67. Uang Tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

1 s/d 67 Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

68. Uang Tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Propinsi Bali dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti ;

8. Menetapkan Terdakwa HARIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Mei 2016 dan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan saudara Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair dan memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Telah mendengar Replik secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2016 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara Lisan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 25 pebruari 2016 Nomor Reg. Perkara PDS-01 /P.1.16/Ft.1/02 / 2016, yaitu :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **HARIANTO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **I KOMANG GDE MERTA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 dan hari Senin tanggal 20 Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana atau setidaknya di suatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa HARIANTO bertemu dengan I KOMANG GDE MERTA di rumah Terdakwa di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dan saat itu I KOMANG GDE MERTA menanyakan apakah ada bantuan dari Propinsi Bali dan Terdakwa mengatakan akan mengecek dulu ;
- Setelah bertemu dengan I KOMANG GDE MERTA selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi I WAYAN SUDARSANA di Rumah Makan Pulukan dan Terdakwa menanyakan apakah ada bantuan dari Gubernur Bali untuk tahun 2013 dan saksi I WAYAN SUDARSANA menyampaikan bahwa setiap tahun pasti ada, lalu Terdakwa menanyakan bagaimana petunjuk untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut dan oleh saksi I WAYAN SUDARSANA disampaikan supaya membuat dulu Kelompok lalu mengajukan permohonan ke Gubernur dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus terus permohonan harus disahkan di Kantor Desa ;
- Setelah mendapat jawaban dari I WAYAN SUDARSANA selanjutnya Terdakwa HARIANTO menemui I KOMANG GDE MERTA di rumah I KOMANG GDE MERTA di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dan Terdakwa menyampaikan ada bantuan dari Gubernur Bali dan besarnya bantuan yang akan diberikan yaitu Rp.50.000.000,- dan ada 2 kelompok yang akan digabungkan dalam satu proposal lalu Terdakwa HARIANTO meminta kepada I KOMANG GDE MERTA untuk memberikan nama-nama yang akan dibuatkan Kelompok dan atas permintaan Terdakwa tersebut maka I KOMANG GDE MERTA memberikan foto copy KTPnya dan foto copy KTP orang-orang yang akan dimasukkan sebagai anggota kelompok kepada Terdakwa HARIANTO. Setelah menerima foto copy KTP Tersebut lalu Terdakwa membuat Proposal dan membuat nama Kelompok yaitu Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, selanjutnya sekitar satu minggu kemudian Terdakwa HARIANTO menelpon I KOMANG GDE MERTA melalui HP dan meminta I KOMANG GDE MERTA untuk datang ke rumah Terdakwa menandatangani proposal permohonan bantuan ke Gubernur Bali, dan atas permintaan Terdakwa HARIANTO tersebut I KOMANG GDE MERTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah Terdakwa HARIANTO untuk menandatangani Proposal Permohonan Bantuan ke Gubernur Bali yang sudah dibuat dan disiapkan oleh Terdakwa HARIANTO dan saat itu I KOMANG GDE MERTA sempat menyampaikan apakah permintaan bantuan tersebut nantinya tidak bermasalah dan Terdakwa HARIANTO menyampaikan bahwa tidak ada masalah karena Terdakwa dulu banyak mendapatkan bantuan dan tidak pernah bermasalah. Terdakwa HARIANTO juga mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah Hibah. Setelah I KOMANG GDE MERTA menandatangani proposal tersebut selanjutnya Terdakwa HARIANTO meminta I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok dan setelah ditanda tangani oleh I MADE WINARTA selanjutnya I KOMANG GDE MERTA membawa kemBali proposal tersebut ke Terdakwa HARIANTO dan Terdakwa HARIANTO yang mengurus kelanjutannya termasuk meminta tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan ;

- Setelah proposal tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa/Perbekel Pulukan selanjutnya Terdakwa HARIANTO mengajukan Proposal tersebut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali dan setelah Proposal tersebut diterima selanjutnya I KOMANG GDE MERTA datang ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali di Denpasar untuk menandatangani dokumen terkait Proposal permohonan bantuan tersebut berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat, Fakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah, Surat Pernyataan kepemilikan rekening Bank.
- Setelah I KOMANG GDE MERTA menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;

- Setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO meminta agar I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO melalui istri Terdakwa bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;
- Pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO kembali meminta I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan Terdakwa tersebut I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;
- Terdakwa HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;
- Setelah menarik semua uang bantuan Gubernur Bali dari rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Mekar Sari di Bank BPD Unit Pekutatan selanjutnya Terdakwa HARIANTO membuat Pembukuan fiktif dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban fiktif yang kemudian dimintakan tandatangan I KOMANG GDE MERTA sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk Panitia Pembelian bibit Kambing Kelompok Ternak Mekar Sari telah dibeli k kambing sebanyak 50 ekor dengan total harga Rp.50.000.000,- padahal uang tersebut tidak dibeli k kambing melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HARIANTO dan I KOMANG GDE MERTA ;

- Perbuatan Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GEDE MERTA tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali yang menentukan :

* Pasal 20 :

1. Penerima hibah menggunakan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
2. Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain ;

* Pasal 21 :

1. Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait ;
 2. Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya ;
 3. Laporan pertanggung jawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah ;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- Perbuatan Terdakwa HARIANTO yang dilakukan bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA tersebut telah menguntungkan Terdakwa HARIANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta menguntungkan I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **HARIANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa **HARIANTO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **I KOMANG GDE MERTA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 dan hari Senin tanggal 20 Januari 2014 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Pulukan Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana atau setidak-tidaknya disuatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa **HARIANTO** bertemu dengan **I KOMANG GDE MERTA** di rumah Terdakwa di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dan saat itu **I KOMANG GDE MERTA** menanyakan apakah ada bantuan dari Propinsi Bali dan Terdakwa mengatakan akan mengecek dulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah bertemu dengan I KOMANG GDE MERTA selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi I WAYAN SUDARSANA di Rumah Makan Pulukan dan Terdakwa menanyakan apakah ada bantuan dari Gubernur Bali untuk tahun 2013 dan saksi I WAYAN SUDARSANA menyampaikan bahwa setiap tahun pasti ada, lalu Terdakwa menanyakan bagaimana petunjuk untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut dan oleh saksi I WAYAN SUDARSANA disampaikan supaya membuat dulu Kelompok lalu mengajukan permohonan ke Gubernur dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus dan anggotanya terus permohonan harus disahkan di Kantor Desa ;
- Setelah mendapat jawaban dari I WAYAN SUDARSANA selanjutnya Terdakwa HARIANTO menemui I KOMANG GDE MERTA di rumah I KOMANG GDE MERTA di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dan menyampaikan ada bantuan dari Gubernur Bali dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa besarnya bantuan yang akan diberikan yaitu Rp.50.000.000,- dan ada 2 kelompok yang akan digabungkan dalam satu proposal lalu Terdakwa HARIANTO meminta kepada I KOMANG GDE MERTA untuk memberikan nama-nama yang akan dibuatkan Kelompok dan atas permintaan Terdakwa tersebut maka I KOMANG GDE MERTA memberikan foto copy KTPnya dan foto copy KTP orang-orang yang akan dimasukkan sebagai anggota kelompok kepada Terdakwa HARIANTO, selanjutnya Terdakwa menggunakan foto copy KTP tersebut untuk membuat Proposal sekaligus membuat nama kelompok yaitu Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan,

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan menempatkan I KOMANG GDE MERTA sebagai Ketua Kelompok.

- Setelah Terdakwa HARIANTO selesai membuat Proposal kemudian Terdakwa menelpon I KOMANG GDE MERTA melalui HP dan meminta I KOMANG GDE MERTA untuk datang ke rumah Terdakwa menandatangani proposal permohonan bantuan ke Gubernur Bali selaku Ketua Kelompok dan atas permintaan Terdakwa HARIANTO tersebut I KOMANG GDE MERTA datang ke rumah Terdakwa HARIANTO untuk menandatangani Proposal Permohonan Bantuan ke Gubernur Bali dan saat itu I KOMANG GDE MERTA sempat menyampaikan apakah permintaan bantuan tersebut nantinya tidak bermasalah dan Terdakwa HARIANTO menyampaikan bahwa tidak ada masalah karena Terdakwa dulu banyak mendapatkan bantuan dan tidak pernah bermasalah. Terdakwa HARIANTO juga mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah Hibah. Setelah I KOMANG GDE MERTA menandatangani proposal tersebut selanjutnya Terdakwa HARIANTO meminta I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok dan setelah ditanda tangani oleh I MADE WINARTA selanjutnya I KOMANG GDE MERTA membawa kemBali proposal tersebut ke Terdakwa HARIANTO dan Terdakwa HARIANTO yang mengurus kelanjutannya termasuk meminta tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan ;
- Setelah proposal tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa/Perbekel Pulukan selanjutnya Terdakwa HARIANTO menggunakan kesempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk mengajukan Proposal tersebut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali dan setelah Proposal tersebut diterima selanjutnya I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok datang ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali di Denpasar untuk menandatangani dokumen terkait Proposal permohonan bantuan tersebut berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat, Fakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah, Surat Pernyataan kepemilikan rekening Bank.

- Setelah I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;
- Setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA selaku Ketua Kelompok menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO meminta agar I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO melalui istri Terdakwa bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

- Pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA selaku Ketua Kelompok menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO kembali meminta I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan Terdakwa tersebut I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;
- Terdakwa HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;
- Setelah menarik semua uang bantuan Gubernur Bali dari rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Mekar Sari di Bank BPD Unit Pekutatan selanjutnya Terdakwa HARIANTO membuat Pembukuan fiktif dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban fiktif yang kemudian dimintakan tandatangan I KOMANG GDE MERTA sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk Panitia Pembelian bibit Kambing Kelompok Ternak Mekar Sari telah dibelikan kambing sebanyak 50 ekor dengan total harga Rp.50.000.000,- padahal uang tersebut tidak dibelikan kambing melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HARIANTO dan I KOMANG GDE MERTA ;

- Perbuatan Terdakwa HARIANTO yang dilakukan bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA tersebut telah menguntungkan Terdakwa HARIANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta menguntungkan I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa HARIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1.1. Saksi **MADE WINARTA**, di depan persidangan setelah bersumpah menurut agama Hindu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa dalam Kelompok Ternak Mekar Sari saksi selaku Sekretaris ;
- Bahwa sekira tahun 2013 I KOMANG GDE MERTA datang ke rumah saksi dengan membawa proposal dan meminta saksi untuk menandatangani proposal yang sudah ada nama saksi selaku sekretaris, sebelumnya saksi sempat menanyakan kepada I KOMANG GDE MERTA untuk apa proposal tersebut, kemudian dijawab oleh I KOMANG GDE MERTA untuk mengajukan bantuan untuk kelompok ternak, dan saksi akan mendapatkan 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa kelompok ternak Mekar Sari memperoleh dana bantuan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun baru dicairkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan menurut I KOMANG GDE MERTA uangnya digunakan untuk membeli kambing sebanyak 20 (dua puluh) ekor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari jumlah 20 ekor kambing mati 15 ekor sehingga sisa 5 ekor ;
- Bahwa saat ini kambing berjumlah 8 ekor karena sekitar bulan April 2015 Terdakwa membeli lagi kambing sebanyak 3 ekor ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari I KOMANG GDE MERTA sisa dana bantuan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disimpan oleh istri dari Terdakwa HARIANTO atas petunjuk dari Terdakwa HARIANTO ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

1.2. Saksi **NI KETUT AYU SEKARINI**, di depan persidangan setelah bersumpah menurut agama Hindu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kelompok ternak Mekar Sari berdiri tahun 2013, I KOMANG GDE MERTA menjabat sebagai ketua Kelompok dan saksi ditunjuk sebagai Bendahara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengambil uang dan melakukan pembayaran terhadap pembelian ternak kambing untuk kelompok ;
- Bahwa pada awalnya Kelompok Ternak Mekar Sari belum dibentuk namun sekitar pertengahan tahun 2013 saksi diajak oleh I KOMANG GDE MERTA untuk ikut membuat kelompok ternak karena akan mendapat bantuan dari pemerintah untuk membeli kambing yang kemudian akan dibagikan kepada

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, beberapa minggu kemudian I KOMANG GDE MERTA datang ke rumah saksi dengan membawa dokumen yang harus saksi tandatangani, namun saksi tidak mengetahui isi dari dokumen tersebut, dan menurut penjelasan dari I KOMANG GDE MERTA bahwa dokumen tersebut adalah proposal yang akan diajukan guna memperoleh bantuan pemerintah untuk Kelompok Ternak Mekar Sari dan proposal tersebut dibuat oleh Terdakwa HARIANTO yang disebut sebagai pengurus Kecamatan Pekutatan ;

- Bahwa tidak pernah diadakan rapat kelompok sebelum penerimaan bantuan, namun sesudah menerima bantuan baru diadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali untuk memberitahukan ke anggota yang berjumlah 10 orang bahwa Kelompok ternak mendapatkan bantuan dana yang sudah diterima oleh I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok yang akan dibelikan kambing oleh I KOMANG GDE MERTA ;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 dana bantuan cair sebesar Rp. 50.000.000,- melalui rekening BPD, dimana saat itu saksi bersama dengan I KOMANG GDE MERTA dan Terdakwa HARIANTO langsung ke BPD untuk mencairkan dana tersebut. Kelompok Ternak Mekar Sari diberikan dana sebesar Rp.20.000.000,- sedangkan yang Rp.30.000.000,- diambil oleh Terdakwa HARIANTO dengan alasan akan diberikan kepada kelompok yang lain karena didalam proposal tersebut dicantumkan 2 (dua) kelompok ternak ;
- Bahwa sebelum membeli ternak kambing tersebut I KOMANG GDE MERTA terlebih dulu melakukan survey dan akhirnya I KOMANG GDE MERTA membeli 10 ekor kambing di Singaraja, dan 10 ekor lagi I KOMANG GDE MERTA beli di Jembrana, keseluruhan pembelian tidak disertai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi, sehingga dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut telah habis digunakan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

1.3. Saksi I **GUSTI NGURAH PUTU SUGIANTA**, di depan persidangan setelah bersumpah menurut agama Hindu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai pendirian Kelompok Ternak Mekar Sari hanya saja pada hari dan tanggal yang tidak dapat saksi ingat lagi sekira tahun 2013 Terdakwa mendatangi saksi ke rumah dan meminta KTP saksi, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa akan membentuk kelompok ternak dan didalam kelompok ternak tersebut saksi sebagai anggota ;
- Bahwa setelah Kelompok ternak tersebut dibentuk saksi tidak pernah mengikuti rapat kelompok dan saksi juga tidak mengetahui mengenai bantuan pemerintah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

1.4. Saksi I **PUTU NYENENG SUARDANA**, di depan persidangan setelah bersumpah menurut agama Hindu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekitar tahun 2013 I **KOMANG GDE MERTA** pernah mengajak saksi untuk bergabung didalam Kelompok Ternak Mekar Sari dimana saat itu I **KOMANG GDE MERTA** meminta KTP, lalu saksi pun memberikannya, setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa, kalau saksi mundur sebagai anggota kelompok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan daripada Kelompok Ternak Mekar Sari tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

1.5. Saksi **I KETUT SUJANA**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sekitar tahun 2013 I KOMANG GDE MERTA pernah mengajak saksi untuk bergabung didalam Kelompok ternak Mekar Sari dimana saat itu I KOMANG GDE MERTA meminta KTP lalu saksi pun memberikannya, setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi menyampaikan kepada I KOMANG GDE MERTA, kalau saksi mundur sebagai anggota kelompok ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan daripada Kelompok Ternak Mekar Sari tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

1.6. Saksi **Ir. NI WAYAN PURNIAWATI**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana sejak tanggal 2 Januari 2012 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang Peternakan adalah :
- Merekomendasikan KKPE untuk masyarakat ;
- Memerintahkan Kasi yang terkait untuk memberikan pelayanan masyarakat ;
- Mengadakan/melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Bintek kepada Kelompok Wanita Tani, Kelompok ternak;
- Bahwa kelompok ternak di Kabupaten Jembrana kurang lebih sebanyak 100 kelompok ;
- Bahwa Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana hanya mendampingi tim dari Propinsi untuk memverifikasi kelompok ternak yang akan menerima bantuan dari Provinsi;
- Bahwa dasar hukum pemberian bantuan hibah tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 39 Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Perubahan Atas Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan bantuan tersebut yaitu : Kelompok Ternak mengajukan proposal ke Bupati tembusan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan setelah itu diverifikasi lalu ditentukan kelompok yang lolos administrasi kemudian saksi membuat jadwal untuk melakukan CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) setelah itu Tim Verifikasi melakukan suvey lalu Tim Verifikasi mengadakan rapat untuk menentukan Kelompok Tani yang layak mendapatkan bantuan, setelah disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan maka saksi membuat SK Bupati tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan yang ditandatangani oleh Bupati setelah itu Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan melaksanakan pengadaan barang melalui tender ;
- Bahwa Kelompok Ternak yang akan menerima bantuan harus memenuhi persyaratan yaitu
 - Memiliki lahan
 - Memiliki Kesekretariatan
 - Memiliki pengukuhan
 - Memiliki ADART
 - Memiliki RAB

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui jumlah bantuan yang diterima Kelompok Ternak di Kabupaten Jembrana adalah PPTK ;
- Bahwa pelaksanaan pengawasan pemberian bantuan dilakukan oleh Kabid, Kasi dan staf berdasarkan jadwal yang telah dibuat ;
- Bahwa setelah saksi mengecek daftar kelompok ternak yang menerima bantuan ternak ternyata kelompok ternak milik I KOMANG GDE MERTA tidak terdaftar di Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa tidak ada proposal dan tidak ada juga surat tembusan yang ditujukan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Jembrana ;
 - Bahwa ada surat dari Propinsi untuk monitoring, baru akan diadakan monitoring dan untuk kasus ini tidak ada surat apapun ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

1.7. Saksi **I WAYAN ARMAWA**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa/Perbekel Pulukan sejak 30 Mei 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 Kelompok Ternak Mekar Sari yang dikelola oleh I KOMANG GDE MERTA mengajukan proposal kepada Bupati Jembrana untuk pengadaan bibit kambing dan pembuatan kandang tetapi tidak disetujui sehingga Kelompok Ternak Mekar Sari tidak mendapatkan bantuan kemudian pada tanggal 20 Juni 2013 I KOMANG GDE MERTA mengajukan proposal kepada Gubernur Bali untuk pengadaan bibit kambing
- Bahwa Terdakwa **HARIANTO** meminta saksi untuk menandatangani Proposal ternak kambing, pada saat itu Terdakwa **HARIANTO** mengatakan sudah ada proposal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum saksi dilantik namun diminta Propinsi untuk memperbaharui proposal agar dana bisa dicairkan ;

- Bahwa setelah saksi mengecek bahwa benar ada proposal yang dibuat sebelum saksi dilantik kemudian saksi menandatangani proposal yang diperbaharui ;
- Bahwa isi proposal tersebut meminta bantuan sosial ke Dinas Peternakan Propinsi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dokumen pendukungnya sudah terlampir didalam proposal termasuk anggota kelompok tetapi tidak semua anggota kelompok adalah peternak ;
- Bahwa saksi menandatangani surat kematian ternak setelah ada panggilan dari Kejaksaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ternak yang diterima kelompok tani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bantuan sudah cair atau tidak ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

1.8. Saksi I **KETUT SUKADANA**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sekitar tahun 2013 I KOMANG GDE MERTA pernah mengajak saksi untuk bergabung didalam Kelompok Ternak Mekar Sari, dimana saat itu I KOMANG GDE MERTA meminta KTP, lalu saksi pun memberikannya, setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi menyampaikan kepada I KOMANG GDE MERTA kalau saksi mundur sebagai anggota kelompok;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan dari Provinsi Bali tahun 2014 karena saksi sudah mengundurkan diri

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.9. Saksi I **WAYAN WIDARSA**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sejak tahun 2012 dan Saksi adalah Dokter Hewan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan pelayanan kepada Kelompok Ternak Mekar Sari, namun pada bulan Mei 2014 s/d Januari 2015 saksi pernah diminta oleh I KOMANG GDE MERTA untuk mengobati kambingnya yang sedang sakit sebanyak 15 ekor dan biaya biaya pengobatan 15 (lima) belas kambing tersebut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa kambing tersebut sakit karena penumpukan gas pada lambung ;
- Bahwa seharusnya pada saat pembelian kambing dikarantina terlebih dahulu ;
- Bahwa sekira bulan Maret 2015 I KOMANG GDE MERTA memberitahu saksi bahwa kambing sebanyak 15 ekor yang pernah diperiksa telah mati dan I KOMANG GDE MERTA menyampaikan bahwa kambing-kambing tersebut merupakan bantuan dari Provinsi Bali kemudian I KOMANG GDE MERTA meminta saksi untuk membuat surat keterangan kematian namun saksi tidak mau membuat surat keterangan kematian dikarenakan tidak ada pelaporan dari awal dan tidak ada bukti fisik, saksi hanya membuat surat keterangan pemeriksaan dan pengobatan ;
- Bahwa apabila ada bantuan ternak dari pemerintah maka Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan mengeluarkan Surat Perintah menunjuk 3 (tiga) dokter hewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pemantauan ternak tersebut dan jadwal pelayanan, kegiatan pelayanannya yaitu : memberi vaksin, pengobatan dan memfasilitasi segala keperluan kelompok yang berhubungan dengan ternak ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

1.10. Saksi I **WAYAN SUDARSANA**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah karyawan Perusda Tk.I Bali Unit Perkebunan ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa HARIANTO dan I KOMANG GDE MERTA di rumah makan Pulukan, waktu itu Terdakwa HARIANTO menyampaikan kepada saksi bahwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok Ternak Mekar Sari akan mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur Bali kemudian saksi memberitahukan kepada I KOMANG GDE MERTA bahwa Kelompok Ternak Mekar Sari harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok serta fotocopy KTP pengurus dan permohonan harus disahkan di kantor desa ;
- Bahwa saksi bertemu kembali dengan I KOMANG GDE MERTA memberitahukan bahwa bantuan dari Gubernur telah cair sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah digunakan untuk membeli kambing ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

1.11. Saksi I **MADE SUARDANA, SE.**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Desa Pulukan, Banjar Pangkung Medahan sejak Nopember 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Kelompok Ternak mekar Sari di Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan pernah mendapatkan bantuan dari Provinsi berupa kambing dan mengenai anggarannya saksi tidak mengetahui, namun baru-baru ini saksi mengetahui bahwa anggarannya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Kelompok Ternak Mekar Sari sejak ketua kelompok yaitu I KOMANG GDE MERTA dan temannya yang bernama HARIANTO (Terdakwa) datang ke rumah saksi kira-kira tahun 2013 meminta tandatangan sebagai bukti guna menerangkan bahwa kambing yang berasal dari bantuan Provinsi sebanyak 9 (sembilan) ekor telah mati, oleh karena bukti otentik tidak ada, sehingga saksi tidak mau menandatangani, kemudian saksi menyarankan agar dilengkapi dokumen-dokumen kematian ternak tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

1.12. Saksi **Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali ;
- Bahwa bantuan yang diterima oleh Kelompok Ternak Mekar Sari tersebut bentuknya adalah Hibah melalui Pemerintah Propinsi Bali, sehingga proposalnya ditujukan kepada Gubernur Bali, setelah itu diteruskan ke SKPD yang terkait yaitu Dinas Peternakan, setelah diterima dan dievaluasi oleh Dinas Peternakan mengenai kelayakan proposal antara lain : peruntukan dananya, keberadaan kelompok dan pejabat yang mengetahui proposal tersebut, setelah diteliti proposal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Ternak Mekar Sari memang layak karena daerah Jembrana memang masuk daerah pengembangan ternak kambing, setelah itu oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Bali, kemudian diteruskan ke TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Propinsi Bali, Cq. Bappeda Propinsi Bali, setelah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh TPAD, maka kelompok tersebut masuk dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), selanjutnya lampiran peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun 2013 dicocokkan lagi dengan kelompok yang minta bantuan tersebut, dan apabila Kelompok tersebut masuk dalam kriteria yang ada didalam lampiran, dilanjutkan dengan pembuatan Keputusan Gubernur Bali tentang penerimaan hibah yang kemudian diteruskan ke Gubernur Bali Cq. Biro Hukum setelah Keputusan tersebut ditandatangani, kemudian dilanjutkan dengan Pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Gubernur dengan Penerima Hibah, setelah itu dilakukan penyelesaian administrasi berupa penandatanganan NPHD, Fakta integritas dari penerima Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Penerima Hibah, Berita Acara Pembayaran Hibah, Foto Copy KTP Penerima Hibah yaitu Ketua dan Bendahara, Surat Pernyataan Tanggung Jawab secara administrasi dari SKPD, Foto Copy rekening Bank yang masih aktif dan kwitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara serta dicap setelah semua dokumen lengkap lalu diajukan ke Bendahara PPKD Biro Keuangan Propinsi Bali ;

- Bahwa acuan yang digunakan didalam melakukan evaluasi terhadap proposal tersebut adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial Propinsi Bali ;
- Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 Kelompok Ternak Mekar Sari sudah pernah melaporkan mengenai penggunaan dana bantuan tersebut ke Propinsi ;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali tidak pernah melakukan monitoring ke lapangan karena tidak tersedianya dana untuk itu ;
- Bahwa monitoring dilakukan setelah ada informasi tentang adanya masalah pada Kelompok Ternak Mekar Sari ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

1.13. Saksi **DESAK KETUT DWI AMERTANI, SH.M.Si.**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Setda Propinsi Bali ;
- Bahwa mekanisme penerbitan SP2D Hibah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali sebagai Leading Sektor mengajukan ke Bendahara pengeluaran PPKD Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dengan kelengkapan berupa : Surat pengantar dari SKPD leading, Keputusan Gubernur Bali, Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Proposal fakta Integritas dari Penerima Hibah, Surat Pernyataan Tanggungjawab secara administrasi dari SKPD leading, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari Penerima Hibah, kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-, Foto Copy rekening Bank dan surat pernyataan bahwa rekening masih aktif, foto Copy KTP Bendahara dan Ketua panitia. Selanjutnya diteliti untuk diproses dan dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), apabila kelengkapannya sudah benar dan sah kemudian dilanjutkan dengan penerbitana SPM (surat perintah membayar), selanjutnya diajukan ke Bagian Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya dibawa ke Bank BPD Bali Cabang Renon untuk ditransfer ke rekening penerima bantuan hibah;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan SP2D untuk Proposal yang diajukan oleh Kelompok Ternak Mekar Sari Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana tanggal 20 Juni 2013, yaitu SP2D Nomor : 22187/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana yang ditransfer untuk Kelompok Ternak Mekar Sari Desa Pulukan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari Dana APBD

1.14. Saksi I **KOMANG GDE MERTA** di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HARIANTO pernah mencari saksi ke rumah dan menyampaikan kalau mau ada bantuan dari Gubernur Bali dan Terdakwa menyampaikan kalau besarnya bantuan yang akan diberikan yaitu Rp.50.000.000,- dan ada 2 kelompok yang akan digabungkan dalam satu proposal lalu Terdakwa HARIANTO meminta kepada saksi untuk memberikan nama-nama yang akan dibuatkan Kelompok lalu saksi kasi nama-nama orang yang akan dimasukkan sebagai anggota kelompok selanjutnya Terdakwa HARIANTO pulang selanjutnya sekitar 1 minggu kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa HARIANTO melalui HP dan meminta saksi untuk datang ke rumahnya menandatangani proposal permohonan bantuan ke Gubernur Bali dimana permohonan tersebut dibuatkan Kelompok dengan nama Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, atas permintaan tersebut saksi datang ke rumah Terdakwa HARIANTO dan di rumah Terdakwa HARIANTO saksi diminta menandatangani Proposal Permohonan Bantuan ke Gubernur Bali yang sudah dibuat dan disiapkan oleh Terdakwa HARIANTO dan saat itu saksi sempat menyampaikan apakah permintaan bantuan tersebut nantinya tidak bermasalah dan Terdakwa HARIANTO menyampaikan bahwa tidak ada masalah karena dia dulu banyak mendapatkan bantuan dan tidak pernah bermasalah, Terdakwa HARIANTO juga mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah Hibah. Setelah saksi menandatangani proposal tersebut selanjutnya Terdakwa HARIANTO meminta saksi membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok dan setelah ditanda tangani oleh I MADE WINARTA selanjutnya saksi membawa kemBali proposal tersebut ke Terdakwa HARIANTO dan

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HARIANTO yang mengurus kelanjutannya termasuk meminta tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan.

- Bahwa selain Susunan Pengurus dan Anggota Kelompok turut pula dilampirkan dalam proposal tersebut adalah foto copy buku rekening bank yaitu Bank BPD Bali dimana untuk membuat buku rekening tersebut yang mengantar saksi ke Bank adalah Terdakwa HARIANTO juga.
- Bahwa yang membawa proposal tersebut untuk diserahkan kepada Gubernur Bali adalah Terdakwa HARIANTO.
- Bahwa bantuan yang diminta sesuai proposal tersebut sudah cair pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.50.000.000,- dan masuk ke Rekening atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing dengan Nomor Rekening : 042-02.25.00043-7.
- Bahwa uang yang ada dalam rekening tersebut sudah saksi tarik dalam 2 kali penarikan masing-masing tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) dan tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa waktu melakukan penarikan uang yang pergi ke Bank adalah saksi bersama bendahara kelompok dan Terdakwa HARIANTO.
- Bahwa uang yang saksi tarik dalam 2 kali penarikan tersebut yaitu tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) oleh Terdakwa HARIANTO diminta supaya saksi menyerahkan kepadanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun setelah saksi mencari Terdakwa HARIANTO di Rumah Makan BMC di Pulukan yang bersangkutan tidak ada disana sehingga sesuai permintaan dari Terdakwa HARIANTO kalau dia tidak ada supaya uangnya saksi serahkan kepada istri Terdakwa HARIANTO yang juga kerja di Rumah Makan BMC tersebut sehingga uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut akhirnya saksi serahkan kepada Istri Terdakwa HARIANTO tidak pakai tanda terima namun disaksikan oleh Bendahara Kelompok NI KETUT AYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARINI sedangkan yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi saksi gunakan untuk membeli bibit kambing sebanyak 10 ekor namun tidak pakai kwitansi pembelian, sedangkan uang yang saksi tarik tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi diminta oleh Terdakwa HARIANTO untuk menyerahkan kepadanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada istri Terdakwa HARIANTO juga sesuai permintaan Terdakwa HARIANTO kalau dia tidak ada di Rumah Makan BMC supaya uangnya saksi serahkan kepada istri Terdakwa HARIANTO, sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi belikan kambing juga sebanyak 10 ekor juga tidak pakai kwitansi pembelian.

- Bahwa Terdakwa HARIANTO meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- tersebut diserahkan kepadanya alasannya karena uang yang diterima tersebut adalah untuk 2 kelompok.
- Bahwa kambing yang saksi beli sebanyak 20 ekor sudah mati sebanyak 15 ekor, jadi sisa 5 ekor tetapi saksi belikan lagi 3 ekor menggunakan uang pribadi saksi kemudian beranak 2 ekor sehingga sekarang ini ada 10 ekor.
- Bahwa untuk pengelolaan dana bantuan Gubernur Bali tersebut saksi tidak pernah membuat pembukuan, Terdakwa HARIANTO yang membuat pembukuan saksi hanya tanda tangan saja walaupun isi dalam buku tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa HARIANTO.

2. KETERANGAN AHLI:

Ahli **PUTU BUDIARTHA, SE**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang akuntansi dan auditing ;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perwakilan BPKP Propinsi Bali dan jabatan ahli saat ini adalah sebagai Auditor Muda;
- Bahwa menurut ahli uang yang diterima oleh Kelompok Ternak Mekar Sari merupakan uang Negara. Sumber uang tersebut adalah dari APBD Provinsi Bali, keluar dari kas Daerah Propinsi Bali melalui mekanisme penerbitan SP2D ;
- Bahwa dengan telah ditariknya uang dari rekening kelompok kemudian dibuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang tidak sesuai dengan kenyataan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena realisasi penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal ;
- Bahwa besarnya kerugian keuangan Negara yang terjadi dari pemberian bantuan kepada Kelompok Ternak Mekar Sari adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Cara menentukannya adalah dengan melakukan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh Penyidik Kejaksaan Negeri Negara. Dari pengujian atas bukti-bukti tersebut, tidak ditemukan bukti pembelian kambing yang telah dilakukan oleh Kelompok Ternak Mekar Sari ;

3. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **HARIANTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu tentang Bantuan Gubernur Bali Tahun Anggaran 2013 kepada Kelompok Ternak "Mekar Sari" di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana karena pada sekitar akhir bulan Pebruari 2013 Ketua Kelompok Ternak "Mekar Sari" I KOMANG GDE MERTA pernah datang ke rumah Terdakwa menanyakan tentang bantuan dari pemerintah ;
- Bahwa setelah I KOMANG GDE MERTA menemui Terdakwa untuk menanyakan tentang adanya Bantuan dari Gubernur Bali tersebut, selanjutnya Terdakwa kemudian mencari informasi tentang adanya bantuan dari Gubernur Bali tersebut, dimana Terdakwa menelpon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SUDARSANA menanyakan bahwa ini ada satu kelompok mau mengajukan bantuan ke Propinsi lalu dijawab oleh I WAYAN SUDARSANA “ya buat saja” kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada I KOMANG GDE MERTA sekaligus meminta data-data yaitu Nama Kelompok, Susunan Pengurus dan Anggota Kelompok serta Terdakwa juga meminta foto copy KTP Pengurus Kelompok dan I KOMANG GDE MERTA memberikan kepada Terdakwa Nama Kelompoknya adalah Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, sedangkan susunan pengurusnya adalah Ketua I KOMANG GDE MERTA, Sekretaris I MADE WINARTA dan Bendahara NI KETUT AYU SEKARINI kemudian memberikan juga foto copy KTP pengurus tersebut serta nama-nama anggota kelompoknya sebanyak 13 orang ;

- Bahwa setelah mendapatkan data-data dari I KOMANG GDE MERTA selanjutnya Terdakwa membuat Proposal ;
- Bahwa I KOMANG GDE MERTA tidak menentukan besarnya bantuan yang akan diminta hanya Pak I WAYAN SUDARSANA memberitahukan kepada Terdakwa supaya dianggarkan saja Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) jadi Terdakwa buat proposal dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah proposal tersebut selesai Terdakwa buat lalu Terdakwa memanggil Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk tanda tangan kemudian setelah ditanda tangani oleh Pengurus Kelompok selanjutnya Terdakwa suruh supaya dimintakan tanda tangan ke Kelian Dinas dan ke Kepala Desa/Perbekel namun beberapa hari kemudian I KOMANG GDE MERTA datang menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa dia hanya bisa minta tanda tangan Kelian Dinas namun Kepala Desa/Perbekel dia tidak bisa ketemu sehingga I KOMANG GDE MERTA meminta bantuan Terdakwa untuk memintakan tanda tangan Kepala Desa/Perbekel karena Terdakwa sering ke Kantor Desa jadi Terdakwa yang memintakan tanda tangan Kepala Desa/Perbekel setelah itu proposal tersebut Terdakwa berikan kepada I WAYAN SUDARSANA untuk diurus di Propinsi dan setelah diurus di Propinsi ternyata ada perbaikan sehingga Terdakwa ikut ke Propinsi mengambil proposal tersebut di Dinas Peternakan dan

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Hewan Propinsi Bali untuk diperbaiki setelah diperbaiki Proposal tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada Pak I WAYAN SUDARSANA untuk diurus lagi di Propinsi ;

- Bahwa bantuan yang diminta sesuai Proposal atas nama Kelompok Ternak "Mekar Sari" yang Terdakwa buat tersebut untuk 1 (satu) kelompok ;
- Bahwa permintaan bantuan sesuai Proposal Kelompok Ternak "Mekar Sari" tersebut disetujui dan besarnya adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan pada akhir bulan Desember 2013 melalui Rekening Bank BPD Bali Cabang Pembantu Pekutatan atas nama Kelompok tersebut ;
- Bahwa bantuan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut sudah ditarik dari Rekening Bank pada awal tahun 2014 dalam 2 tahap penarikan ;
- Bahwa dari dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut yang diterima oleh I KOMANG GEDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Rp.30.000.000,- lagi Terdakwa yang mengambilnya dengan alasan bahwa bantuan tersebut untuk 2 kelompok ;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- sudah dipakai untuk membeli bibit kambing meskipun sebenarnya ada uang yang Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi saksi sebesar Rp.30.000.000,- maksudnya supaya uangnya klop saja sehingga tidak ketahuan di Propinsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa HARIANTO pernah membantu I KOMANG GDE MERTA membuatkan Proposal atas nama Kelompok yaitu Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk pengadaan bibit ternak kambing.
2. Bahwa benar proposal yang dibuat oleh Terdakwa HARIANTO dan ditandatangani oleh I KOMANG GDE MERTA yang dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus kemudian Terdakwa HARIANTO meminta I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan oleh Terdakwa HARIANTO .
3. Bahwa benar Terdakwa HARIANTO pernah menemui I KOMANG GDE MERTA di rumah I KOMANG GDE MERTA di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dan Terdakwa menyampaikan ada bantuan dari Gubernur Bali dan besarnya bantuan yang akan diberikan yaitu Rp.50.000.000,- dan ada 2 kelompok yang akan digabungkan dalam satu proposal .
4. Bahwa benar setelah proposal tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa/Perbekel Pulukan selanjutnya Terdakwa HARIANTO mengajukan Proposal tersebut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali dan setelah Proposal tersebut diterima selanjutnya I KOMANG GDE MERTA datang ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali di Denpasar untuk

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen terkait Proposal permohonan bantuan tersebut berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat, Fakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah, Surat Pernyataan kepemilikan rekening Bank.

5. Bahwa benar setelah I KOMANG GDE MERTA menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;
6. Bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO meminta agar I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO melalui istri Terdakwa bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;
7. Pada benar tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan Terdakwa tersebut I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

8. Bahwa benar Terdakwa HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;
9. Bahwa benar setelah menarik semua uang bantuan Gubernur Bali dari rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Mekar Sari di Bank BPD Unit Pekutatan selanjutnya Terdakwa HARIANTO membuat Pembukuan fiktif dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban fiktif yang kemudian dimintakan tandatangan I KOMANG GDE MERTA sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk Panitia Pembelian bibit Kambing Kelompok Ternak Mekar Sari telah dibelikan kambing sebanyak 50 ekor dengan total harga Rp.50.000.000,- padahal uang tersebut tidak dibelikan kambing melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HARIANTO dan I KOMANG GDE MERTA ;
10. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Propinsi Bali dengan telah ditariknya uang dari rekening kelompok kemudian dibuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena realisasi penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal dan besarnya kerugian keuangan Negara yang terjadi dari pemberian bantuan kepada Kelompok Ternak Mekar Sari adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukannya adalah dengan melakukan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh Penyidik Kejaksaan Negeri Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

DAKWAAN:

Primair:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Subsida:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas , maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu , dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair , namun bila dakwaan primair telah terbukti , maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana disebut di atas, adalah:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa HARIANTO pernah membantu I KOMANG GDE MERTA membuatkan Proposal atas nama Kelompok yaitu Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk pengadaan bibit ternak kambing.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan Terdakwa HARIANTO telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa HARIANTO menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.;

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001,

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan Terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar Terdakwa HARIANTO pernah membantu I KOMANG GDE MERTA membuat Proposal atas nama Kelompok yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk pengadaan bibit ternak kambing.

Menimbang, bahwa benar proposal yang dibuat oleh Terdakwa HARIANTO dan ditandatangani oleh I KOMANG GDE MERTA yang dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus kemudian Terdakwa HARIANTO meminta I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan oleh Terdakwa HARIANTO .

Menimbang, bahwa benar setelah saksi I KOMANG GDE MERTA menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;

Menimbang, bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO meminta agar I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO melalui istri Terdakwa bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO kembali meminta I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan Terdakwa tersebut I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;

Menimbang, bahwa benar setelah menarik semua uang bantuan Gubernur Bali dari rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Mekar Sari di Bank BPD Unit Pekutatan selanjutnya Terdakwa HARIANTO membuat Pembukuan fiktif dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban fiktif yang kemudian dimintakan tandatangan I KOMANG GDE MERTA sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk Panitia Pembelian bibit Kambing Kelompok Ternak Mekar Sari telah dibelikan kambing sebanyak 50 ekor dengan total harga Rp.50.000.000,- padahal uang tersebut tidak dibelikan kambing melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HARIANTO dan I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa setelah proposal disetujui dan dananya ditransper ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan, oleh saksi I KOMANG GDE MERTA ditarik/dicairkan bersama dengan Terdakwa HARIANTO dan dana tersebut tidak dipergunakan sesuai proposal yang diajukan sebelumnya, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HARIYANTO dan saksi I KOMANG GDE MERTA dan untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana tersebut dibuatkan laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban fiktif, hal jelas perbuatan Terdakwa HARIYANTO dan saksi I KOMANG GDE MERTA bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum” dakwaan primair dalam perkara ini adalah telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan primair berikutnya, yaitu;

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi tidak di atur secara tegas, apa yang dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “, artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Kamus Umum Bahasa Indonesia hal 240, M2S Bandung tahun 1997). Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan, sedangkan menurut Andi Hamzah memperkaya itu menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pers, 2007)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa dalam perkara ini telah bertambah kekayaannya, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO meminta agar I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO melalui istri Terdakwa bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO kembali meminta I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan Terdakwa tersebut I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka uang yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam perkara ini untuk masing-masing Para Terdakwa yaitu Terdakwa HARIANTO sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi I KOMANG GDE MERTA Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Para Terdakwa sejumlah tersebut diatas, menurut pendapat Majelis adalah relatif kecil sehingga belum masuk dalam kategori memperkaya atau bertambahnya kekayaan para Terdakwa secara signifikan, bahwa uang yang diperoleh Para Terdakwa tersebut lebih tepat sebagai keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi ;



Menimbang, bahwa dari alasan tersebut di atas, oleh karena itu menurut majelis unsur Memperkaya dalam dakwaan Primair ini tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum , maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.**



5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

1. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;



Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO meminta agar I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO melalui istri Terdakwa bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO kembali meminta I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan Terdakwa tersebut I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka uang yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam perkara ini untuk masing-masing Para Terdakwa yaitu Terdakwa HARIANTO sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi I KOMANG GDE MERTA Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini telah terbukti dalam perkara ini Terdakwa HARIANTO memperoleh uang dari tindak pidana korupsi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi I KOMANG GDE MERTA Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing , maka hal ini jelas dalam perkara ini telah menguntungkan Terdakwa HARIANTO dan saksi I KOMANG GDE MERTA (Terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) . Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

2. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar Terdakwa HARIANTO pernah membantu I KOMANG GDE MERTA membuatkan Proposal atas nama Kelompok yaitu Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk pengadaan bibit ternak kambing.

Menimbang, bahwa benar proposal yang dibuat oleh Terdakwa HARIANTO dan ditandatangani oleh I KOMANG GDE MERTA yang dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus kemudian Terdakwa HARIANTO meminta I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan oleh Terdakwa HARIANTO .

Menimbang, bahwa benar setelah saksi I KOMANG GDE MERTA menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;



Menimbang, bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO meminta agar I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO melalui istri Terdakwa bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO kembali meminta I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan Terdakwa tersebut I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;

Menimbang, bahwa benar setelah menarik semua uang bantuan Gubernur Bali dari rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Mekar Sari di Bank BPD Unit Pekutatan selanjutnya Terdakwa HARIANTO membuat Pembukuan fiktif dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban fiktif yang kemudian dimintakan tandatangan I KOMANG GDE MERTA sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk Panitia Pembelian bibit Kambing

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Ternak Mekar Sari telah dibelikan kambing sebanyak 50 ekor dengan total harga Rp.50.000.000,- padahal uang tersebut tidak dibelikan kambing melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HARIANTO dan I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa HARIYATO berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi I KOMANG GDE MERTA yang menjabat selaku ketua Kelompok Ternak Mekar sari , Terdakwa HARIYANTO menggunakan kesempatan atau menggunakan saksi I KOMANG GDE MERTA yang mempunyai jabatan serta kewenangan yang ada sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, begitu juga Saksi I KOMANG GDE MERTA yang menjabat selaku ketua kelompok ternak Mekar sari memberikan kesempatan kepada Terdakwa HARIYANTO , sehingga terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini . Hal ini terlihat bahwa setelah proposal disetujui dan dananya ditransper ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan, oleh saksi I KOMANG GDE MERTA ditarik/dicairkan bersama dengan Terdakwa HARIANTO dan dana tersebut tidak dipergunakan sesuai proposal yang diajukan sebelumnya, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HARIYANTO dan saksi I KOMANG GDE MERTA dan untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban fiktif, hal jelas perbuatan Terdakwa HARIYANTO dan saksi I KOMANG GDE MERTA bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali, atau dengan kata lain tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah saksi I KOMANG GDE MERTA menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;

Menimbang, bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO meminta agar I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO melalui istri Terdakwa bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO kembali meminta I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan Terdakwa tersebut I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- untuk



kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Propinsi Bali dengan telah ditariknya uang dari rekening kelompok kemudian dibuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena realisasi penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal dan besarnya kerugian keuangan Negara yang terjadi dari pemberian bantuan kepada Kelompok Ternak Mekar Sari adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta para terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) hal ini tidak menghapuskan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, namun pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para terdakwa akan menjadi faktor yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang di cantumkan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : *"Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu"* ;

Menimbang, bahwa unsur "turut serta/dilakukan secara bersama-sama" ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama". Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Menimbang, bahwa menurut pendapat SIMONS dalam bukunya *Leerboek van het Nederland Strafrecht* bahwa untuk adanya turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, manakala menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama secara fisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan kata lain untuk adanya *mededaderschap* itu didasarkan adanya “*phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*”. Mengenai *beweste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tugas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerjasama. (Prof. Mr. D. SIMONS, *Leerboek van het Nederland Strafrecht*, halaman 303-320 dalam Drs. P.A.F. LAMINTANG, D. DJISMAN SAMOSIR, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, halaman 39);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936) dan memuat kaidah hukum “Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang berkerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Terdakwa HARIANTO pernah membantu I KOMANG GDE MERTA membuat Proposal atas nama Kelompok yaitu Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk pengadaan bibit ternak kambing.

Menimbang, bahwa benar proposal yang dibuat oleh Terdakwa HARIANTO dan ditandatangani oleh I KOMANG GDE MERTA yang dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus kemudian Terdakwa HARIANTO meminta I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan oleh Terdakwa HARIANTO .

Menimbang, bahwa benar setelah saksi I KOMANG GDE MERTA menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;

Menimbang, bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO meminta agar I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO melalui istri Terdakwa bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA kembali datang

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan Terdakwa HARIANTO kembali meminta I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan Terdakwa tersebut I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa HARIYATO berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi I KOMANG GDE MERTA yang menjabat selaku ketua Kelompok Ternak Mekar sari , Terdakwa HARIYANTO menggunakan kesempatan atau menggunakan saksi I KOMANG GDE MERTA yang mempunyai jabatan serta kewenangan yang ada sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, begitu juga Saksi I KOMANG GDE MERTA yang menjabat selaku ketua kelompok ternak Mekar sari memberikan kesempatan kepada Terdakwa HARIYANTO , sehingga terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Para terdakwa saling mengetahui secara sadar bahwa perbuatan itu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku . Hal ini menurut majelis , fakta ini menunjukkan adanya hubungan atau kerjasama yang erat serta disadari untuk terjadinya perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dakam perkara ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dalam perkara ini, berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti lainnya, terdakwa telah mengakui bahwa dalam tindak pidana korupsi dalam perkara ini telah memperoleh harta berupa uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan seluruhnya yang dijadikan bukti dalam perkara ini , maka menurut majelis terdakwa HARIYANTO tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti, namun terhadap pengembalian kerugian negara sebesar Rp 30.000.000 .(tiga puluh juta rupiah yang dijadikan barang bukti dirampas untuk negara karena diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi , maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum dan sependapat dengan pembelaan penasehat hukum terdakwa , dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana, namun mengenai berapa hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa , majelis mempunyai pertimbangan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan putusan yang sering-ringannya atau seadil-adilnya, hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pbenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini serta pengembalian kerugian negara oleh terdakwa , sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai tersebut di atas, terhadap Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk perkara lain, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **HARIANTO** tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARIANTO** dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dan 2(dua) bulan ,serta denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 2(dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.50.000.000,-
 2. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran hibah kepada kelompok masyarakat tanggal 20 Desember 2013 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Fakta Integritas Nomor : 01/PPBKMS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah Nomor : 02/PPBKMS/XII/ 2013 tanggal 17 Desember 2013.
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan I Komang Gde Merta tanggal 17 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Secara Administrasi Terhadap Penggunaan Dana Belanja Hibah Kelompok Masyarakat tanggal 19 Desember 2013 ;
7. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Gubernur Bali Nomor 2353/03-N/HK/2013 Tentang Penerima Hibah Kepada Kelompok Masyarakat tanggal 3 Desember 2013 beserta lampirannya
8. 1 (satu) eksemplar asli Naskah Perjanjian hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Nomor : 900/6521/SEKRET-KEU
03/KTT AR/XII/2013
Tentang Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Penerima hibah Sebagaimana Dalam Keputusan Gubernur Bali Noor 2353/03-N/HK/2013 ;
9. 2 (dua) lembar foto copy rekening Bank BPD No. Rek. : 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian bibit Kambing ;
10. 2 (dua) lembar foto copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 13 Desember 2013 ;
11. 1 (satu) eksemplar foto copy Proposal Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana tanggal 20 Juni 2013 ;
12. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana tanggal 10 Pebruari 2014 ;
- 13.1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 900/9278/Sekret/ Disnakkeswan perihal Pengajuan Administrasi Permohonan Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat ;
14. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat Nomor : 900/10149/KEU tanggal 20 Desember 2013 ;
15. 2 (dua) lembar Lampiran III Peraturan Gubernur Bali tanggal 25 Oktober 2013 Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Halaman 71 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

16. 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank BPD No. Rek. : 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing yang distempel asli ;
17. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Tabungan Periode : 01-12-2013 s/d 13-04-2015 No. Rek. 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing ;
18. 1 (satu) buah Buku Kas 3 Kolom ;
19. 9 (sembilan) lembar foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengobatan Ternak Kambing
20. 9 (sembilan) lembar foto copy Berita Acara Kematian Ternak ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Nota Debet/Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar No. RNO/PNB/2013.D tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,-
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 22187/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang telah disahkan ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 02453/SPM-LS/PPKD/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- ;
24. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- untuk pembayaran Belanja Hibah Kelompok Masyarakat Kepada Panitia Pengadaan Bibit Babi Kelompok Usaha Kecil Wanita Taman Asri, Banjar Balik II Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana untuk Pengadaan Bibit Babi, beserta 27 (dua puluh tujuh) Penerima Dana Hibah Kelompok Masyarakat lainnya, Tahun 2013.
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 tanggal 24 Desember 2013
26. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 ;
28. 1 (satu) lembar foto Nota Dinas dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Nomor : 524/10043/Sekret/Disnakkeswan tanggal 24 Desember 2013 hal : Pembatalan Hibah kepada Kelompok Masyarakat ;
29. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2002 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali ;
30. 1 (satu) buah buku folio dengan format Buku Kas;
31. 1 (satu) bundel kelengkapan KTP dan lain-lain;
32. 4 (empat) lembar kuitansi belanja sewa ruang rapat/pertemuan dan kelengkapan dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi Bali atas nama Ir. I Ketut Suania ;
33. 1 (satu) bendel Proposal yang berisi :
- ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Pengadaan Kandang dan Kambing, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal Renovasi Masjid Jami "Nurul Huda" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Perlengkapan Kelompok Suka Duka Muslimin "Nurul Jadid" Banjar Pulukan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Merajan Dadya "Pasemetonan Arya Wangbang Pinatih" Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Merajan Dadya "Warga Bali Mula" Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal permohonan Bantuan Pembangunan Tembok Penyengkar Merajan Dadya Warga Pasek Gel-Gel Lingkungan

Halaman 73 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;

34.1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Pura Kahyangan Jagat Bhujangga Sakti Luwuh;

35.1 (satu) buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perbekel Desa Pulukan Tahun 2014;

36.3 (tiga) buah Proposal Panitia Perlengkapan Kelompok Suka Duka "GIRI ANYAR" Banjar Mengenuanyar Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana ;

37.1 (satu) buah buku tamu Kelompok Ternak Kambing "Sinar Matahari" Banjar Pasinggahan, Desa Medewi Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

38.1 (satu) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing "Sinar Mentari" Banjar Pasinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

39.4 (empat) buah Hasil Verifikasi Kelompok;

40.1 (satu) buah RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kelompok Ternak Kambing "Sinar Mentari";

41.4 (empat) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing "Maju Jaya Mandiri" Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

42.1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing "Maju Jaya Mandiri" Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

43.4 (empat) lembar Struktur Kelompok Ternak Kambing "Maju Jaya Mandiri" Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

44.1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kelompok Ternak Kambing "Maju Jaya Mandiri";

45.1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok;

46.10 (sepuluh) lembar fotocopy KTP atas nama :

- I GEDE EKA ARDANA;
- I KADEK AGUS ARIANA;
- I MADE SAPUTRA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I KETUT ARTA;
- I MADE SUWATRA;
- I KETUT MUSTIKA;
- I MADE MIDEH;
- I WAYAN KADER;
- I NYOMAN JULIARTA;
- I NYOMAN SUTARJANA ARIASA;

47.7 (tujuh) lembar fotocopi Kartu Keluarga atas nama :

- I KETUT ARTA;
- I MADE SUWARTA;
- I KETUT MUSTIKA;
- I MADE MIDEH;
- I KADEK RITA BUDHI ATMAJA;
- I NYOMAN JULIARTA;
- I NYOMAN SUTARJANA ARIASA.

48.1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing "KARYA ABADI"
Banjar Bunut Bolon, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan,
Kabupaten Jembrana;

49.3 (tiga) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing "KARYA ABADI"
Banjar Bunut Bolon, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan,
Kabupaten Jembrana;

50.1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok ;

51.1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing "Cahaya Baru"
Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten
Jembrana;

52.4 (empat) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing "Cahaya Baru"
Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten
Jembrana;

53.1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok;

54.1 (satu) buah Surat tanggal 24 Februari 2015 : Permohonan sebagai
pemohon intervensi di dalam perselisihan internal Partai Golkar antara
kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November
sampai dengan 3 Desember 2014 (Ketua Umum Aburizal Bakrie dan
Sekretaris Jendral Idrus Marham) dengan kepengurusan hasil Munas IX

Halaman 75 dari 69 Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Golkar di Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014
(Ketua Umum H.R. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin
Amali) ;

55.1 (satu) buah surat Nomor : B-21/Golkarda/III/2015 tanggal 12 Maret
2015 perihal instruksi;

56.1 (satu) buah surat nomor : B-22/Golkarda/III/2015 tanggal 13 Maret 2015
perihal Undangan Rakorda DPD Partai Golkar Provinsi Bali;

57.1 (satu) buah surat undangan nomor:../Banser/PIK/1603/2015 tanggal
16 Maret 2015;

58.1 (satu) buah surat permohonan intervensi tanggal 26 Februari 2015;

59.5 (lima) bendel fotokopi KTP;

60.1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUHARIADI;

61.3 (tiga) bendel fotocopi Kartu Keluarga;

62.4 (empat) lembar surat kesepakatan kelompok Ternak Kambing :

- Kelompok Ternak Kambing "Sinar Mentari";
- Kelompok Ternak Kambing "Cahaya Baru";
- Kelompok Ternak Kambing "Karya Abadi";
- Kelompok Ternak Kambing "Maju Jaya Mandiri.

63.4 (empat) lembar fotocopi Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor:
490/BPMD/2013 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan
Desa Se-Kecamatan Pekutatan tanggal 2 September 2013.

64.4 (empat) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi atas nama :

- Kelompok Maju Jaya Mandiri ;
- Kelompok Karya Abadi ;
- Kelompok Sinar Mentari ;
- Kelompok Cahaya Baru ;

65.4 (empat) lembar Surat Pernyataan atas nama :

- Kelompok Maju Jaya Mandiri ;
- Kelompok Karya Abadi ;
- Kelompok Sinar Mentari ;
- Kelompok Cahaya Baru ;

66.4 (empat) lembar nama pembuat pernyataan atas nama :

- Kelompok Maju Jaya Mandiri ;
- Kelompok Karya Abadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelompok Sinar Mentari ;
- Kelompok Cahaya Baru ;

67. Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pengembalian kerugian negara dari terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari Terdakwa HARIYANTO sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).

1 s/d 67 Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **kamis , tanggal 26 Mei 2016**, oleh kami : **Achmad Peten Sili,SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Putu Gde Hariadi S.H., M.H.**, dan **Hartono, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 1 Juni 2016** Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **Ni Nengah Karang,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh **Suhadi,SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
<u>Putu Gde Hariadi,SH.,MH.</u>	<u>Achmad Peten Sili,SH.,MH.</u>
<u>Hartono,SH., MH.</u>	

Panitera Pengganti,



Ni Nengah Karang,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)